



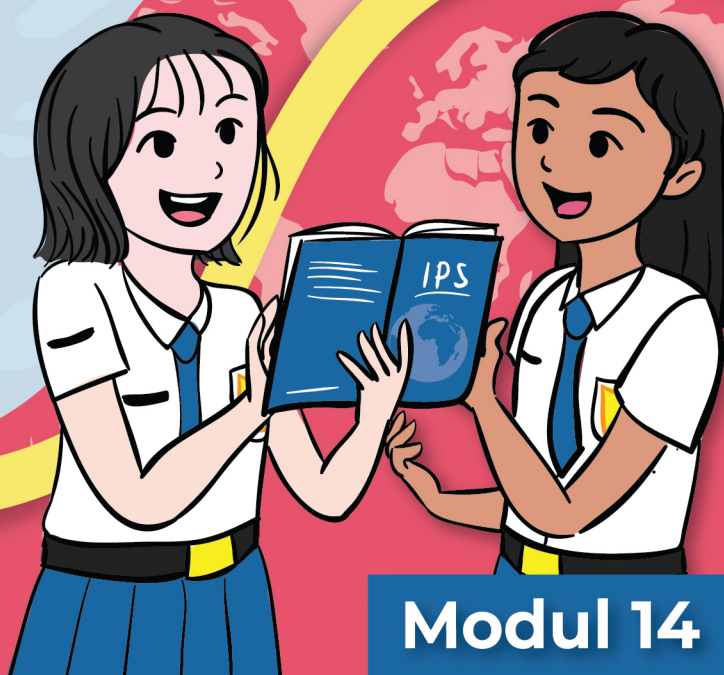
BARANG MILIK NEGARA

Modul Pembelajaran SMP Terbuka

ILMU PENGETAHUAN

SOSIAL

Kelas
IX



Modul 14

**MASA DEMOKRASI
TERPIMPIN (1959–1965)**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama



Modul Pembelajaran SMP Terbuka
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Kelas IX

Modul 14
Masa Demokrasi Terpimpin
(1959-1965)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama
2021

© Hak cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

Modul Pembelajaran SMP Terbuka

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Modul 14

**Masa Demokrasi Terpimpin
(1959-1965)**

Kelas IX

Pengarah:

Mulyatsyah

Penanggung Jawab:

Eko Susanto

Kontributor:

Imam Pranata, Harnowo Susanto,
Ninik Purwaning Setyorini,
Maulani Mega Hapsari

Penulis:

Edi Sumardi

Reviewer:

Neni Suharjani

Editor:

Didi Teguh Chandra, Amsor,
Agus Fany Chandra Wijaya, Hutnal Basori,
Sukma Indira, Kader Revolusi,
Andi Andangatmadja, Tri Mulya Purwiyanti,
Tim Layanan Khusus

Layout Design:

Ghina Fitriana,
Belaian Pelangi Baradiva,
Lulu Mustikaning Apsari

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Sekolah Menengah Pertama



www.ditsmp.kemdikbud.go.id



[ditsmp.kemdikbud](https://www.instagram.com/ditsmp.kemdikbud)



[Direktorat SMP Kemdikbud](#)



[Direktorat SMP](#)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah berhasil menyusun Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas IX dengan baik. Tujuan disusunnya Modul Pembelajaran ini adalah sebagai salah satu bentuk layanan penyediaan bahan belajar peserta didik SMP Terbuka agar proses pembelajarannya lebih terarah, terencana, variatif, dan bermakna. Dengan demikian, tujuan memberikan layanan SMP Terbuka yang bermutu bagi peserta didik SMP Terbuka dapat terwujud.

Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas IX yang telah disusun ini disajikan dalam beberapa kegiatan belajar untuk setiap modulnya dan beberapa modul untuk setiap mata pelajarannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan adanya modul pembelajaran SMP Terbuka kelas IX ini, kami berharap, peserta didik dapat memperoleh kemudahan dan kebermaknaan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran mandiri dan terstruktur. Selain itu, Guru Pamong dan Guru Bina pun dapat merancang, mengarahkan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan lebih baik sebagai bagian dari proses peningkatan mutu layanan di SMP Terbuka. Dengan layanan SMP Terbuka yang bermutu, peserta didik akan merasakan manfaatnya dan termotivasi untuk mencapai cita-citanya menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan diterbitkannya Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas IX ini diharapkan kualitas layanan pembelajaran di SMP Terbuka menjadi lebih baik. Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas IX ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami berharap dapat memperoleh kritik, saran, rekomendasi, evaluasi, dan kontribusi nyata dari berbagai pihak untuk kesempurnaan modul ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas IX ini. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka dengan segala kerendahan hati akan kami perbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2021
Direktur
Sekolah Menengah Pertama,



Drs. Mulyatsyah, M.M.
NIP. 196407141993041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
I. Pendahuluan	1
A. Deskripsi Singkat.....	1
B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	1
C. Petunjuk Belajar.....	2
D. Peran Orang Tua dan Guru	3
II. Kegiatan Belajar 1: Perkembangan Politik.....	5
A. Indikator Pembelajaran	5
B. Aktivitas Pembelajaran	5
C. Tugas.....	12
D. Rangkuman	13
E. Tes Formatif	14
III. Kegiatan Belajar 2: Perkembangan Ekonomi dan Masyarakat pada Masa Demokrasi	
Terpimpin.....	17
A. Indikator Pembelajaran	17
B. Aktivitas Pembelajaran	17
C. Tugas.....	20
D. Rangkuman	21
E. Tes Formatif	22
TES AKHIR MODUL.....	25
LAMPIRAN.....	29
A. Glosarium.....	29
B. Kunci Jawaban Tes Formatif	30
C. Kunci Jawaban Tes Akhir Modul	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 14.1 Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 1959	6
Gambar 14.2 Pembukaan Ganefo (Games of the New Emerging Forces), Senayan Jakarta, 1963	7
Gambar 14.3 Tokoh-Tokoh Pendiri Gerakan Non-Blok	8
Gambar 14.4 Presiden Soekarno sedang berpidato untuk berkonfrontasi dengan Malaysia.....	9
Gambar 14.5 Demonstrasi menentang kekuasaan Belanda di Irian Barat	10
Gambar 14.6 Tujuh Pahlawan Revolusi, Korban G 30 S / PKI 1965	11



DAFTAR TABEL

Tabel 14.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	1
Tabel 14.2 Aktivitas 1 Kegiatan Belajar 1	9
Tabel 14.3 Aktivitas 2 Kegiatan Belajar 1	11
Tabel 14.4 Aktivitas 1 Kegiatan Belajar 2	18
Tabel 14.5 Aktivitas 2 Kegiatan Belajar 2	19





I PENDAHULUAN



Masa Demokrasi Terpimpin (1959 -1965)

A. DESKRIPSI SINGKAT

Tanpa Ananda sadari, ternyata Ananda telah memasuki semester genap. Hal ini berkat kerja keras dan disiplin serta rasa tanggung jawab yang besar sehingga Ananda tidak mengalami kesulitan apapun dalam mempelajari modul-modul sebelumnya. Ananda juga tanpa hambatan mampu mengerjakan tugas-tugas yang ada pada setiap modul, serta telah berhasil dengan baik mengikuti Tes Akhir Modul yang dilaksanakan oleh guru. Selamat buat Ananda!

Modul yang akan Ananda pelajari dalam modul 14 adalah "Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)" Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi pelajaran yang harus Ananda pelajari antara lain adalah perkembangan politik dari keluarnya Dekrit Presiden, penyimpangan-penyimpangan UUD 1945, pelaksanaan politik luar negeri, terbentuknya Gerakan Non-Blok, Konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan Irian Barat, dan peristiwa G 30 S/PKI 1965. Pada bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain; pembentukan Depernas, melakukan devaluasi mata uang rupiah, deklarasi ekonomi, sedangkan di bidang sosial adanya ajaran Nasakom. Dengan mempelajari modul ini dapat memberi gambaran Ananda tentang Masa Demokrasi Terpimpin, sehingga Ananda dapat mengambil hikmah dengan peristiwa tersebut untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara benar.

B. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Dasar (KD) merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai Ananda untuk suatu mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Berikut Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada pembelajaran Modul 14 ini.

Tabel 14.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti Pengetahuan	Kompetensi Inti Keterampilan
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar Pengetahuan	Kompetensi Dasar Keterampilan
3.4. Menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi.	4.4. Menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang (geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya) dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi.

C. PETUNJUK BELAJAR

Sebelum Ananda menggunakan Modul 14 ini terlebih dahulu Ananda baca petunjuk mempelajari modul berikut ini:

1. Pelajarilah modul ini dengan baik. Mulailah mempelajari materi pelajaran yang ada dalam Modul 14 di setiap kegiatan pembelajaran hingga Ananda dapat menguasainya dengan baik;
2. Lengkapilah setiap bagian aktivitas dan tugas yang terdapat dalam modul ini dengan semangat dan gembira. Jika mengalami kesulitan dalam melakukannya, catatlah kesulitan tersebut pada buku catatan Ananda untuk dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakan langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung;
3. Lengkapi dan pahami setiap bagian dalam rangkuman sebagai bagian dari tahapan penguasaan materi modul ini;
4. Kerjakan bagian Tes Formatif pada setiap bagian Kegiatan Belajar sebagai indikator penguasaan materi dan refleksi proses belajar Ananda pada setiap kegiatan belajar. Ikuti petunjuk pengerjaan dan evaluasi hasil pengerjaannya dengan seksama;
5. Jika Ananda telah menguasai seluruh bagian kompetensi pada setiap kegiatan belajar, lanjutkan dengan mengerjakan Tes Akhir Modul secara sendiri untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak/Ibu Guru;
6. Gunakan Daftar Pustaka dan Glosarium yang disiapkan dalam modul ini untuk membantu mempermudah proses belajar Ananda.



Teruntuk Bapak/Ibu Orang Tua peserta didik, berkenan Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menampung serta membantu memecahkan permasalahan belajar yang dialami oleh Ananda peserta didik. Jika permasalahan belajar tersebut belum dapat diselesaikan, arahkanlah Ananda peserta didik untuk mencatatkannya dalam buku catatan mereka untuk didiskusikan bersama teman maupun Bapak/Ibu Guru mereka saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.

Teruntuk Bapak/Ibu Guru, modul ini disusun dengan orientasi aktivitas peserta didik dan setiap modul dirancang untuk dapat mencakup satu atau lebih pasangan kompetensi-kompetensi dasar yang terdapat pada kompetensi inti 3 (pengetahuan) dan kompetensi inti 4 (keterampilan). Setiap peserta didik diarahkan untuk dapat mempelajari modul ini secara mandiri, namun demikian mereka juga diharapkan dapat menuliskan setiap permasalahan pembelajaran yang ditemuinya saat mempelajari modul ini dalam buku catatan mereka. Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Bapak/Ibu Guru dapat membahasnya dalam jadwal kegiatan pembelajaran yang telah dirancang sehingga Ananda peserta didik dapat memahami kompetensi-kompetensi yang disiapkan dengan tuntas.

II

KEGIATAN BELAJAR 1



Perkembangan Politik

A. Indikator Pembelajaran

1. Menjelaskan perkembangan politik
2. Mengidentifikasi beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945
3. Menjelaskan akibat pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dibidang politik

B. Aktivitas Pembelajaran



Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, materi pokok yang harus Ananda pelajari adalah:

1. Perkembangan politik
2. Penyimpangan UUD 1945

Masa Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)

Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa Demokrasi Termimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1965.

1. Perkembangan Politik

a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Demokrasi Parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Selain itu, Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isinya adalah sebagai berikut.

- 1) menetapkan pembubaran Konstituante;
- 2) menetapkan UUD 1945 berlaku kembali terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS); dan
- 3) pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhirilah masa Demokrasi Parlementer dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demikian pula mulai saat itu, sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial.



Gambar 14.1 Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 1959.

Sumber: Buku Ilmu Pengetahuan Sosial, SMP/MTs KELAS IX, Kemdikbud, 2018

b. Penyimpangan terhadap UUD 1945

Pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut antara lain:

- 1) Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS);
- 2) MPRS yang seharusnya dipilih melalui pemilu bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden;
- 3) Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden; dan
- 4) Pengangkatan presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur hidup.

c. Kekuatan Politik Nasional

Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan politik, yaitu: Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI Angkatan Darat. Partai-partai yang ada ditekan agar memberikan dukungan terhadap gagasan presiden. Partai politik yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah di bubarkan dengan paksa. Sampai tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu: PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).

d. Politik Luar Negeri

Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, China, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara.

1) Oldefo dan Nefo

Oldefo (*The Old Established Forces*) adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya. Khususnya negara-negara kapitalis. Nefo (*The New Emerging Forces*) adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Indonesia lebih banyak menjalin kerja sama dengan negara-negara Nefo. Hal ini terlihat dengan dibentuknya Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan China) dan Poros Jakarta–Phnom Penh–Hanoi–Pyongyang (Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara).

2) Politik Mercusuar

Politik Mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada *kedudukan* yang terkemuka di kalangan Nefo, diantaranya adalah penyelenggaraan Ganefo (*Games of the New Emerging Forces*), pembangunan kompleks olahraga Senayan, dan pembangunan Monumen Nasional (Monas).



Gambar 14.2 Pembukaan Ganefo (Games of the New Emerging Forces), Senayan, Jakarta, 1963

Sumber: <https://id.pinterest.com>

3) Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok terbentuk diprakarsai oleh PM India Jawaharlal Nehru, PM Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Jossep Broz Tito. Gerakan Non-Blok (GNB) secara resmi berdiri melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahun 1961 di *Beograd*, Yugoslavia. Adapun tujuan pendirian Gerakan Non-Blok antara lain adalah sebagai berikut.

- a) Menentang imperialisme dan kolonialisme
- b) Menyelesaikan sengketa secara damai.
- c) Mengupayakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju.
- d) Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet.



Gambar 14.3 Tokoh-Tokoh Pendiri Gerakan Non-Blok

Sumber: <https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com>

4) Konfrontasi dengan Malaysia

Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malayasia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Kesultanan Sulu. Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara.

Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Isi Dwikora adalah sebagai berikut.

- a) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
- b) Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung. Pada tanggal 7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dengan spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB.



Gambar 14.4 Presiden Soekarno sedang berpidato untuk berkonfrontasi dengan Malaysia

Sumber: <https://id.pinterest.com>



Aktivitas 1

Tabel 14.2

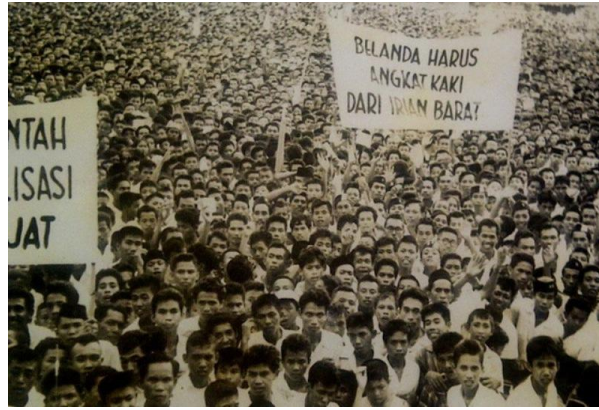
Jawablah pertanyaan di bawah ini!

No	Kebijakan Politik	Penjelasan
1	<i>Oldefo dan Nefo</i>
2	<i>Politik Mercusuar</i>

5) Pembebasan Irian Barat

Sesuai isi KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun, pada kenyataannya lebih dari satu tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat pada Indonesia. Selanjutnya sejak tahun 1954 setiap tahun persolan Irian Barat berulang-ulang dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah memperoleh tanggapan positif. Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menempuh sikap keras melalui konfrontasi total terhadap Belanda, antara lain sebagai berikut.

- Melalui UU No.13 Tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia- Belanda.
- Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia.
- Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu (Tidore) untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda.



Gambar 14.5 Demonstrasi menentang kekuasaan Belanda di Irian Barat.

Sumber: <https://nasional.okezone.com>

Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Untuk melaksanakan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/Pangti ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

6) Peristiwa G 30 S/PKI 1965

Peristiwa Gerakan 30 September/PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer dipimpin Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Setelah melakukan pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai dua sarana komunikasi penting, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) di jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan.

Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) memutuskan segera mengambil alih pimpinan TNI Angkatan Darat dari Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad. Pada malam hari tanggal 1 Oktober 1965, RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. Selanjutnya, Mayjen Soeharto mengumumkan melalui radio tentang keadaan yang sebenarnya kepada rakyat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G 30 S/PKI berhasil digagalkan.



Gambar 14.6 Tujuh Pahlawan Revolusi, Korban G 30 S / PKI 1965
Sumber: <https://galamedia.pikiran-rakyat.com>



Aktivitas 2

Tabel 14.3


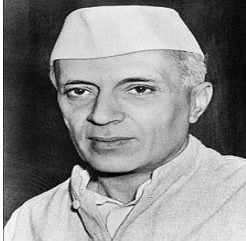


Jawablah pertanyaan di bawah ini!

No	Peristiwa	Penjelasan
1	<i>Pembebasan Irian Barat</i>	<p>.....</p> <p>.....</p>
2	<i>G 30 S/PKI 1965</i>	<p>.....</p> <p>.....</p>

C. Tugas



Lengkapilah kolom tentang Tokoh-Tokoh Gerakan Non-Blok (GNB)!

NO	TOKOH	NAMA	ASAL NEGARA
1	 https://id.wikipedia.org		
2	 https://en.wikipedia.org		
3	 https://id.wikipedia.org		
4	 https://www.wikiwand.com/id		

5			
	https://en.wikipedia.org		



Marilah kita menyusun rangkuman untuk kegiatan pembelajaran ini! Ananda bisa berpartisipasi menyusun rangkuman pada titik-titik di bawah ini!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bagus! Ananda telah berhasil melengkapi rangkuman!
Sekarang coba bacalah kembali rangkuman yang telah kita susun!

E. TES FORMATIF



Untuk mengetahui apakah Ananda telah menguasai materi pelajaran pada kegiatan belajar 1 ini, kerjakan tugas yang disediakan. Tes Formatif ini harus dikerjakan sendiri tanpa melihat kunci jawaban.

Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D yang Ananda anggap paling tepat!

1. Bukti besarnya kekuasaan Presiden pada masa demokrasi terpimpin adalah....
 - A. presiden mengangkat anggota MPRS
 - B. presiden membentuk Zaken Kabinet
 - C. presiden menyatakan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945
 - D. Presiden membubarkan dewan perwakilan rakyat hasil pemilu
2. Selama konfrontasi Malaysia presiden Soekarno mencanangkan program....
 - A. Dwikora
 - B. Trikora
 - C. Tritura
 - D. Tri Darma
3. Berikut ini ialah salah satu isi TRIKORA....
 - A. Dukungan agresi mogok buruh Indonesia
 - B. Boikot produk-produk Belanda
 - C. Gagalakan pembentukan Negara Papua
 - D. Bantu usaha rakyat Kalimantan Utara
4. Presiden Soekarno membubarkan dewan perwakilan rakyat pada tahun 1960 dan Mengubahnya menjadi....
 - A. Deppernas
 - B. DPR-GR
 - C. Dewan Nasional
 - D. Front Nasional
5. Negara yang bergabung dalam Oldefo adalah negara-negara
 - A. kolonialis
 - B. kapitalis
 - C. komunis
 - D. sosialis

Petunjuk Evaluasi Hasil Pengerjaan Tes Formatif

1. Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 1 ini, silahkan cocokkan jawaban Ananda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul IPS 14. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai} : \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

2. Jika Nilai Capaian yang Ananda peroleh kurang dari 75 (d disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan), Ananda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih mengalami kesulitan, catatlah pada buku catatan Ananda bagian mana saja yang masih belum Ananda pahami untuk kemudian Ananda dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
3. Jika tingkat penguasaan yang Ananda peroleh lebih dari atau sama dengan 75, Ananda dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya.



III

KEGIATAN BELAJAR 2

Perkembangan Ekonomi dan Masyarakat Masa Demokrasi Terpimpin

A. Indikator Pembelajaran

1. Menjelaskan perkembangan ekonomi;
2. Menjelaskan keadaan masyarakat; dan
3. Menjelaskan akibat pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dibidang ekonomi.

B. Aktivitas Pembelajaran



Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, materi pokok yang harus Ananda pelajari adalah:

1. Perkembangan ekonomi
2. Keadaan masyarakat

1. Perkembangan Ekonomi

a. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibentuk berdasarkan Undang- Undang No. 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1958. Tugas dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Mohammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959.

Pada 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas). Ketuanya dijabat secara langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas badan ini menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

b. Devaluasi Mata Uang Rupiah

Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi (menurunkan nilai mata uang) Rp 1.000 dan Rp 500 menjadi Rp 100 dan Rp 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp 25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara.

c. Deklarasi Ekonomi

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pada bulan September 1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.



Aktivitas 1

Tabel 14.4

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

No.	Kebijakan Ekonomi	Penjelasan
1	Dewan Perancang Nasional
2	Deklarasi Ekonomi

2. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

a. Kehidupan Sosial

Ajaran Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya.

b. Pendidikan

Pada tahun 1950, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen Protestan dan Katolik didirikan Sekolah Tinggi Theologia dan seminari-seminari. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi.

Pada tahun 1962 sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat, dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas II, jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki perguruan tinggi. Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada Bank Tabungan Pos, kantor pos, kantor pos pembantu. Para penabung diatur oleh Departemen P dan K bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos.

c. Kebudayaan

Pada masa Demokrasi Terpimpin bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Manifesto Kebudayaan mendapat kecaman keras dari Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu, akibatnya tidak sampai satu tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah.



Aktivitas 2

Tabel 14.5

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

No	Kehidupan Masyarakat	Penjelasan
1	Sosial
2	Pendidikan
3	Kebudayaan

C. Tugas



Buatlah tulisan tentang “**NASAKOM**” 1-2 halaman dengan menuliskan sumber tentang tulisan tersebut, dengan format seperti contoh dibawah ini!

I. PENDAHULUAN

II. ISI

III. PENUTUP

IV. KESIMPULAN



Marilah kita menyusun rangkuman untuk kegiatan pembelajaran ini! Ananda bisa berpartisipasi menyusun rangkuman pada titik-titik di bawah ini!

[illegible]

Bagus! Ananda telah berhasil melengkapi rangkuman!
Sekarang coba bacalah kembali rangkuman yang telah kita susun!

E. TES FORMATIF



Untuk mengetahui apakah Ananda telah menguasai materi pelajaran pada kegiatan belajar 1 ini, kerjakan tugas yang disediakan. Tes Formatif ini harus dikerjakan sendiri tanpa melihat kunci jawaban.

Pilih salah satu jawaban A, B, C, atau D yang Ananda anggap paling tepat!

1. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1. Mengawasi pelaksanaan pembangunan
2. Mencukupi kebutuhan sandang pangan
3. Untuk membendung inflasi yang tetap tinggi
4. Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan
5. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat

Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan dilakukan devaluasi pada masa demokrasi terpimpin ditujukan pada nomor....

- A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 3, dan 4
- C. 3, 4, dan 5
- D. 4, 5, dan 1

2. Berbagai upaya perbaikan ekonomi yang ditempuh pemerintah selama masa Demokrasi Terpimpin, *kecuali*

- A. Sistem Ekonomi Ali-Baba
- B. Repelita
- C. Program Benteng
- D. Konsepsi Nasakom

3. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, dibawah kabinet karya dibuat dewan perancang nasional pada tanggal 15 agustus 1959. Dewan perancang nasional dipimpin oleh

- A. Muh. Yamin
- B. Chairul Saleh
- C. Otto Iskandardinata
- D. Radjiman wedyodiningrat

4. Setelah dinasionalisasi, *De Javasche Bank* berubah menjadi

- A. Bank Central
- B. Bank Indonesia
- C. Bank Internasional
- D. Bank Tabungan Negara

5. Tujuan dilaksanakannya sistem ekonomi Gerakan Banteng adalah
- A. bantuan kredit agar pengusaha Indonesia dapat bersaing dengan pengusaha luar negeri
 - B. menghindarkan persaingan antara pengusaha pribumi dan pengusaha nonpribumi
 - C. meningkatkan nilai ekspor yang menghasilkan devisa negara
 - D. memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri dari persaingan industri swasta asing

Petunjuk Evaluasi Hasil Pengerjaan Tes Formatif

1. Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 2 ini, silahkan cocokkan jawaban Ananda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul IPS 14. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai} : \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

2. Jika Nilai Capaian yang Ananda peroleh kurang dari 75 (d disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan), Ananda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih mengalami kesulitan, catatkan pada buku catatan Ananda bagian mana saja yang masih belum Ananda pahami untuk kemudian Ananda dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
3. Jika tingkat penguasaan yang Ananda peroleh lebih dari atau sama dengan 75, Ananda dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya.

TES AKHIR MODUL



Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang pada huruf **A, B, C,** atau **D!**

1. Indonesia pernah keluar sebagai anggota PBB, penyebabnya adalah
 - A. Indonesia sedang ada revolusi
 - B. keluar dari PBB lebih menguntungkan
 - C. Keanggotaan Indonesia PBB sudah habis
 - D. Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

2. Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut adalah
 - A. membentuk Dewan Nasional
 - B. membubarkan Dewan Konstituante
 - C. meminta dukungan Angkatan Darat
 - D. membentuk Kabinet Gotong Royong

3. Perhatikan pernyataan berikut ini!
 1. menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan
 2. memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 dari kelangsungan hidup negara
 3. merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan DPAS
 4. memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara
 5. memberi peluang bagi militer untuk tujuan dalam bidang politikBerdasarkan pernyataan di atas, sisi positif berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan oleh nomor
 - A. 1, 2, dan 3
 - B. 2, 3, dan 4
 - C. 4, 5, dan 1
 - D. 5, 3, dan 2

4. Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang bertujuan
 - A. membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat
 - B. mengusahakan persenjataan ke negara-negara blok komunis
 - C. menggerakkan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat
 - D. mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat

5. Perkembangan budaya demokrasi di Indonesia ditinjau dalam waktu tahun 1959-1965 disebut dengan
- A. periode demokrasi liberal
 - B. masa demokrasi terpimpin
 - C. periode demokrasi Pancasila
 - D. periode demokrasi parlementer
6. Berikut ini yang bukan mendasari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah
- A. Dewan Konstituante gagal untuk merumuskan UUD baru
 - B. Dewan Konstituante tidak mampu untuk memutuskan kembali ke UUD 1945
 - C. Dewan Konstituante secara aklamasi menghendaki untuk kembali ke UUD 1945
 - D. dalam setiap persidangan Dewan Konstituante selalu diwarnai pertentangan antarpolitik
7. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya
- A. Ketetapan MPRS Nomor 1 / MPRS / 1960
 - B. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR
 - C. Pembentukan Front Nasional
 - D. Dekrit presiden 5 Juli 1959
8. Perhatikan pernyataan berikut!
- 1. mengawasi pelaksanaan pembangunan
 - 2. mencukupi kebutuhan sandang pangan
 - 3. untuk membendung inflasi yang tetap tinggi
 - 4. untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
 - 5. menigkar ningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan
- Tujuan dilakukan devaluasi pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan pada nomor
- A. 1, 2, dan 3
 - B. 2, 3, dan 4
 - C. 3, 4, dan 5
 - D. 5, 2, dan 1
9. Sesuai isi Perjanjian New York, Irian Barat tidak akan langsung diserahkan kepada Indonesia, tetapi akan berada di bawah pemerintahan sementara PBB yang dinamakan
- A. UNSF
 - B. UNTEA
 - C. UNCI
 - D. UNHCR
10. Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional. Ajaran tersebut memiliki tujuan
- A. memicu konfrontasi dengan Malaysia
 - B. memperkuat kedudukan Presiden Soekarno
 - C. membatasi kekuatan DPR dalam pemerintahan
 - D. mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup

11. Perhatikan pernyataan berikut!

1. volume ekspor meningkat
2. utang-utang negara semakin meningkat
3. pendapatan dari sektor investasi menurun
4. Inflasi semakin tidak terkendali

Kegagalan program Dana Revolusi ditunjukkan oleh angka

- A. 1, dan 2
- B. 1, dan 3
- C. 2, dan 3
- D. 2, dan 4

12. Indonesia mengadakan hubungan istimewa dengan RRC melalui politik yang disebut politik

- A. poros
- B. balas budi
- C. mercusuar
- D. etis

13. Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke

- A. Cina
- B. Amerika
- C. Blok komunis
- D. Blok Barat

14. Pada masa demokrasi terpimpin, PKI merupakan partai politik yang cukup disegani karena

- A. menjadi partai memegang pemilu 1955
- B. menjadi partai politik yang terdepan mendukung kebijakan presiden
- C. menjadi partai politik yang paling didukung oleh rakyat
- D. menjadi partai yang terkaya

15. Pemerintah Indonesia berupaya memperjuangkan wilayah Irian Barat melalui Sidang Umum PBB tahun 1954-1957. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan karena

- A. Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda
- B. dua pertiga peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat
- C. masalah Irian Barat tidak didukung peserta Konferensi Asia-Afrika
- D. Indonesia melakukan agresi militer terhadap wilayah Irian Barat

LAMPIRAN



GLOSARIUM

deflasi	: penurunan harga barang yang terjadi pada periode tertentu dan terjadi dalam waktu yang lama.
deklarasi	: sebuah keterangan lengkap mengenai suatu biaya, uang barang yang masuk dan lain sebagainya.
Dekrit Presiden	: perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia dan bersifat mutlak guna memulihkan keadaan negara jika terjadi hal tidak diinginkan
devaluasi	: suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi nilai mata uang lokal pada nilai mata uang asing.
Ganefo	: ajang olahraga tandingan Olimpiade ciptaan mantan presiden Indonesia, Soekarno, pada 10 November 1963.
inflasi	: kenaikan suatu harga barang yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang
kebijakan moneter	: kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar.
konfrontasi	: permusuhan; pertentangan; cara menentang musuh dengan berhadapan langsung dan terang-terangan.
<i>Nefo</i>	: negara-negara yang memiliki pandangan antikapitalisme dan antikolonialisme
<i>Oldefo</i>	: negara-negara kapitalis yang condong kepada kolonialisme.
orde lama	: perujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965.
politik mercusuar	: kebijakan politik luar negeri yang ditempuh pada periode Indonesia era demokrasi terpimpin.
<i>retooling kabinet</i>	: pembersihan anggota kabinet yang terlibat PKI. Para mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam KAMI dan KAPI menuntut retooling Kabinet Dwikora.
tragedi	: peristiwa yang menyedihkan



Kunci Jawaban Tes Formatif

KEGIATAN BELAJAR 1

No.	Kunci jawaban
1	D
2	A
3	C
4	B
5	B

KEGIATAN BELAJAR 2

No.	Kunci jawaban
1	C
2	D
3	A
4	B
5	D



Kunci Jawaban Tes Akhir Modul

No.	Kunci jawaban	No.	Kunci jawaban	No.	Kunci jawaban
1	D	6	C	11	D
2	A	7	D	12	A
3	A	8	C	13	C
4	C	9	B	14	B
5	B	10	B	15	B

PEDOMAN PENSKORAN

$$\text{Nilai} : \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

DAFTAR PUSTAKA

Iwan Setiawan Dkk. 2017. Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemdikbud

Sumber Internet (diakses pada 2 November 2021):

<https://id.pinterest.com>

<https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com>

<https://nasional.okezone.com>

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com>

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Direktorat Sekolah Menengah Pertama

